

## **Strategi Menghadapi Disinformasi Dalam Konteks Perang Asimetris**

**Dwiki Setya Hendrawan<sup>1</sup> Ahmad G Dohamid<sup>2</sup> Mochammad Afifuddin<sup>3</sup>**

Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [dwikisetya.hendrawan@gmail.com](mailto:dwikisetya.hendrawan@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Disinformasi telah menjadi ancaman strategis dalam konteks perang asimetris yang memanfaatkan kerentanan sosial, politik, dan teknologi untuk menciptakan ketidakstabilan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang efektif dalam menghadapi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan keamanan Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2024. Dengan menggunakan metode quasi kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui kajian literatur, analisis media, dan studi kasus Pemilu 2024 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi sering disebarkan melalui platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan TikTok, dengan narasi yang memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan identitas. Studi juga menemukan bahwa strategi mitigasi yang efektif mencakup peningkatan literasi digital, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan platform digital, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum. Literasi digital yang rendah dan kurangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan menjadi tantangan utama dalam melawan disinformasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menghadapi disinformasi memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan teknologi, edukasi masyarakat, dan regulasi yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerja sama antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman disinformasi yang semakin kompleks.

**Kata Kunci:** Disinformasi, Literasi Digital, Strategi Mitigasi, Pemilu 2024, Perang Asimetris

### **Abstract**

*Disinformation has emerged as a strategic threat in asymmetric warfare, exploiting social, political, and technological vulnerabilities to destabilize nations. This study aims to analyze effective strategies for countering disinformation that disrupts Indonesia's social, political, and security stability, particularly in the context of the 2024 elections. Using a quasi-qualitative descriptive method and case study approach, data were collected through literature reviews, media analysis, and the 2024 Indonesian election case study. The findings reveal that disinformation is often spread through social media platforms such as YouTube, Facebook, and TikTok, utilizing sensitive narratives related to religion, politics, and identity. Effective mitigation strategies include enhancing digital literacy, cross-sector collaboration between the government and digital platforms, and strengthening regulation and law enforcement. Challenges include low digital literacy and declining public trust in government institutions. This study concludes that countering disinformation requires a multidimensional approach integrating technology, public education, and robust regulation. It recommends strengthening cooperation among governments, media, and civil organizations to establish a healthier information ecosystem. These measures are critical to bolstering national resilience against increasingly complex disinformation threats.*

**Keywords:** Asymmetric Warfare, Digital Literacy, Disinformation, Mitigation Strategies, 2024 Election



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Perang asimetris telah berkembang menjadi fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk penggunaan disinformasi sebagai alat untuk menciptakan ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi. Fenomena ini sering kali dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara untuk mencapai tujuan strategis mereka tanpa menggunakan

kekuatan militer konvensional (Jones, 2023). Disinformasi dapat didefinisikan sebagai informasi yang sengaja dibuat atau disebarluaskan untuk menyesatkan audiens. Dalam konteks Indonesia, keragaman etnis, agama, dan budaya menjadi titik lemah yang dapat dieksploitasi melalui narasi yang memecah belah masyarakat (Yusuf & Rahmat, 2023). Strategi disinformasi sering memanfaatkan media sosial sebagai medium utama karena jangkauan dan kecepatannya yang luar biasa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, menjadikannya target potensial dari kampanye disinformasi global. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% populasi Indonesia mendapatkan berita mereka melalui media sosial, yang sering kali kurang diverifikasi kebenarannya (Siregar, 2022). Hal ini memperburuk penyebaran disinformasi di kalangan masyarakat.

Selain itu, perang asimetris sering kali melibatkan aktor non-negara yang menggunakan taktik disinformasi untuk mengganggu sistem pemerintahan. Kelompok ini dapat berupa organisasi teroris, kelompok ekstremis, atau bahkan perusahaan asing yang memiliki agenda tertentu terhadap Indonesia (Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengidentifikasi ancaman ini secara dini. Salah satu karakteristik utama disinformasi dalam perang asimetris adalah sifatnya yang adaptif. Disinformasi dapat dengan mudah menyesuaikan narasi untuk mengakomodasi isu-isu lokal yang sensitif, seperti konflik agama, ketimpangan ekonomi, atau ketegangan politik (Kurniawan, 2023). Adaptivitas ini membuat ancaman disinformasi sulit untuk diantisipasi. Penetrasi internet yang semakin luas di Indonesia telah memperparah situasi ini. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan akses informasi yang luas, tetapi di sisi lain, hal ini juga membuka peluang besar bagi aktor jahat untuk menyebarkan narasi palsu dengan lebih efektif (Hidayat, 2022). Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam menghadapi ancaman ini. Literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia menjadi tantangan utama dalam melawan disinformasi. Sebuah studi oleh LIPI (2022) menemukan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi berita palsu. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Kerentanan terhadap disinformasi juga diperburuk oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan yang menurun. Ketidakpercayaan ini sering kali dimanfaatkan oleh aktor yang ingin melemahkan legitimasi pemerintah melalui narasi yang menciptakan ketidakstabilan (Simanjuntak, 2023). Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik menjadi bagian integral dari strategi pertahanan. Dalam konteks perang asimetris, ancaman disinformasi tidak hanya berdampak pada sektor politik, tetapi juga keamanan nasional. Misalnya, kampanye disinformasi dapat memprovokasi konflik horizontal antar-komunitas yang berpotensi mengarah pada kerusuhan massal (Arief, 2023). Oleh sebab itu, disinformasi harus dianggap sebagai ancaman multidimensional. Kerangka hukum juga menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi disinformasi. Indonesia telah memiliki UU ITE yang mengatur penyebaran informasi palsu, tetapi implementasinya sering kali menemui kendala, seperti kurangnya bukti digital atau proses hukum yang lambat (Putri & Anggraeni, 2023). Perbaikan pada sisi regulasi ini menjadi prioritas yang mendesak.

Selain regulasi, kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial menjadi kunci untuk mengatasi ancaman disinformasi. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang disebar di platform mereka sesuai dengan standar komunitas dan tidak memicu konflik (Santoso, 2023). Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui mekanisme pemantauan bersama. Peningkatan kapasitas aparat keamanan dalam mendeteksi dan mencegah disinformasi juga diperlukan. Teknologi seperti analisis big data dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memetakan pola penyebaran disinformasi secara real-time (Wibowo, 2023). Hal ini memungkinkan tindakan

pengecambahan yang lebih efektif. Di tingkat masyarakat, edukasi dan pelatihan tentang literasi digital harus menjadi prioritas. Program-program ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya disinformasi (Rachman, 2023). Hanya dengan masyarakat yang sadar informasi, ancaman ini dapat diminimalisasi. Pendekatan multi-sektoral diperlukan untuk menghadapi disinformasi dalam perang asimetris. Pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya. Dengan strategi yang terintegrasi, Indonesia dapat lebih tangguh dalam menghadapi ancaman disinformasi (Hastuti, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat digunakan Indonesia untuk menghadapi ancaman disinformasi dalam konteks perang asimetris. Dengan mengeksplorasi dimensi-dimensi ancaman disinformasi, artikel ini berupaya memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk merancang langkah-langkah yang efektif dalam melindungi stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional. Tujuan ini dicapai dengan mengkaji literatur terbaru, menganalisis kasus-kasus relevan, serta menawarkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor terkait. Berdasarkan analisis fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti mengangkat judul penelitian Strategi Menghadapi Disinformasi dalam Konteks Perang Asimetris Untuk menjelaskan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah diantaranya: Bagaimana strategi yang efektif untuk menghadapi disinformasi dalam konteks perang asimetris yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara? Apa saja langkah mitigasi yang berbasis pada ketahanan nasional dan komunikasi strategis yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak disinformasi dalam perang asimetris di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi disinformasi sebagai ancaman non-militer yang dapat mengganggu ketahanan nasional Indonesia serta mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi langkah-langkah mitigasi berbasis ketahanan nasional dan komunikasi strategis dalam mengurangi dampak disinformasi dalam perang asimetris. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini mencakup pengembangan literatur tentang perang asimetris dan disinformasi dalam konteks Indonesia, kontribusi pada studi ketahanan nasional dengan memasukkan disinformasi sebagai ancaman non-militer, peningkatan pemahaman komunikasi strategis dalam menghadapi disinformasi, serta rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, penguatan literasi digital masyarakat, pengembangan program kolaboratif antara pemerintah, media, dan platform digital, dan penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial, terutama dalam situasi perang asimetris.

### **Tinjauan Pustaka**

1. Perang Asimetris. Perang asimetris merupakan bentuk konflik yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak yang lebih lemah, sering kali aktor non-negara seperti kelompok teroris atau milisi, memanfaatkan taktik non-konvensional untuk mengimbangi superioritas lawan yang lebih kuat secara militer atau teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ketidakseimbangan dengan menyerang kelemahan lawan melalui cara-cara yang tidak tradisional, seperti propaganda, disinformasi, atau serangan siber (Buffalo, 2019). Karakteristik utama perang asimetris mencakup beberapa elemen. Pertama, adanya pemanfaatan kelemahan pihak lawan, baik dalam sistem pertahanan maupun stabilitas sosial, seperti polarisasi masyarakat atau ketidakpuasan terhadap pemerintah (Buffalo, 2019). Kedua, penggunaan taktik non-konvensional menjadi inti strategi perang asimetris. Taktik ini meliputi penyebaran

disinformasi dan propaganda untuk memanipulasi opini publik, menciptakan keraguan terhadap institusi, dan melemahkan kepercayaan publik kepada pemerintah (Smith, 2020). Ketiga, keterlibatan aktor non-negara yang sulit dilacak dan ditindak secara langsung, seperti kelompok teroris atau individu tertentu yang beroperasi melalui platform digital (Jones, 2021). Selain itu, teknologi modern memainkan peran penting dalam perang asimetris. Media sosial dan serangan siber menjadi alat utama untuk menyebarkan narasi palsu dan melakukan serangan strategis yang dirancang untuk menciptakan gangguan besar dengan sumber daya minimal (Buffalo, 2019; Jones, 2021). Fokus perang ini bukan pada penghancuran fisik, melainkan pada efek psikologis dan sosial yang bertujuan untuk melemahkan legitimasi serta menciptakan instabilitas sosial (Smith, 2020). Dalam konteks ini, perang asimetris menjadi bentuk konflik yang kompleks, memaksa lawan menghadapi ancaman yang tidak terduga dan sulit dikendalikan.

2. Disinformasi sebagai Senjata. Disinformasi merupakan informasi yang sengaja dibuat atau disebarluaskan untuk menyesatkan dan memanipulasi opini publik, sering kali dengan tujuan menciptakan ketidakstabilan sosial, politik, atau ekonomi. Sebagai senjata dalam konteks perang asimetris, disinformasi digunakan oleh aktor negara maupun non-negara untuk mencapai tujuan strategis tanpa menggunakan kekuatan militer konvensional. Disinformasi ini memanfaatkan kerentanan sosial dan teknologi modern untuk memperluas dampaknya secara cepat dan luas (Wardle & Derakhshan, 2017). Mekanisme penyebaran disinformasi biasanya melibatkan tiga tahap utama. Pertama, produksi konten, di mana informasi palsu dibuat dengan mengadopsi narasi yang menarik atau memprovokasi emosi. Kedua, distribusi melalui media, termasuk media sosial, platform berita palsu, atau grup perpesanan instan, yang memungkinkan penyebaran disinformasi dengan cepat ke berbagai audiens. Ketiga, penguatan melalui algoritma, di mana sistem media sosial memprioritaskan konten yang kontroversial atau viral, sehingga memperbesar jangkauan disinformasi (Vosoughi et al., 2018). Dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial sangat signifikan. Disinformasi dapat memicu polarisasi masyarakat, melemahkan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, dan menciptakan konflik horizontal. Misalnya, kampanye disinformasi yang memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama atau identitas dapat memperburuk perpecahan sosial dan mengganggu kohesi nasional (Guess et al., 2020). Selain itu, disinformasi sering digunakan untuk mendelegitimasi proses demokrasi, seperti pemilu, dengan menyebarkan narasi tentang kecurangan atau ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Fletcher et al., 2020). Dengan kemajuan teknologi, ancaman disinformasi semakin sulit untuk diantisipasi. Oleh karena itu, strategi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi, dan memitigasi dampak sosial dan politik dari disinformasi.
3. Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan, menyesuaikan, dan pulih dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks ancaman non-militer seperti disinformasi, kerangka ketahanan nasional mengintegrasikan berbagai elemen, termasuk teknologi, regulasi, literasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat (Buzan et al., 1998). Kerangka ketahanan nasional terhadap ancaman disinformasi melibatkan tiga komponen utama. Literasi digital masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu untuk mengenali, menganalisis, dan menolak informasi palsu. Literasi digital yang baik memungkinkan masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi manipulatif yang tersebar luas melalui media sosial (Livingstone & Helsper, 2007). Regulasi dan penegakan hukum, yang mencakup kebijakan untuk mengatur penyebaran informasi di

platform digital serta sanksi tegas terhadap pelaku penyebaran disinformasi. Di Indonesia, misalnya, UU ITE menjadi dasar hukum untuk menangani kasus penyebaran berita palsu, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan (Siregar, 2022). Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, platform media sosial, media arus utama, dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini diperlukan untuk memantau, mendeteksi, dan menangkal disinformasi secara efektif. Platform digital seperti Facebook dan Twitter memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mekanisme moderasi konten dan algoritma yang lebih transparan (Wardle & Derakhshan, 2017). Disinformasi sebagai ancaman non-militer dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memicu polarisasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan ketahanan nasional yang komprehensif diperlukan untuk mengantisipasi dampaknya dan menjaga stabilitas nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode quasi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode quasi kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pengumpulan data melalui kajian dokumen, tetapi tidak sepenuhnya berfokus pada data numerik atau statistik (Creswell, 2018). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, serta konteks sosial, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses analisis. Proses analisis data dilakukan secara induktif untuk menemukan pola, tema, dan makna dalam fenomena yang diteliti, lebih mengutamakan pemahaman mendalam dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan kajian literatur, dan analisis media. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara rinci disinformasi dalam konteks Pemilu di Indonesia, memberikan gambaran dampak nyata dari fenomena ini, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Dinamika Disinformasi dalam Perang Asimetris**

Media sosial telah menjadi saluran utama dalam penyebaran disinformasi karena kemampuannya untuk menjangkau audiens luas dengan cepat. Pola penyebaran ini sering dimulai dari akun-akun anonim atau bot yang memproduksi informasi palsu secara masif. Sebagai contoh, studi oleh Tandoc et al. (2023) menunjukkan bahwa algoritma media sosial memperkuat konten dengan tingkat keterlibatan tinggi, termasuk disinformasi, sehingga mempercepat penyebarannya ke berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks perang asimetris, disinformasi ini sering dirancang untuk memanfaatkan isu-isu sensitif, seperti agama atau politik, untuk memicu konflik sosial. Disinformasi sering kali diperkuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi. Kelompok ini memanfaatkan influencer atau figur publik untuk menyebarkan informasi palsu dengan lebih efektif. Menurut laporan dari Wardle dan Derakhshan (2022), aktor-aktor ini menggunakan teknik "astroturfing" untuk menciptakan kesan dukungan publik yang luas terhadap isu tertentu. Fenomena ini meningkatkan legitimasi disinformasi di mata masyarakat. Algoritma media sosial memainkan peran signifikan dalam penyebaran disinformasi. Penelitian oleh Vosoughi et al. (2023) menunjukkan bahwa algoritma cenderung memprioritaskan konten yang kontroversial atau emosional, yang sering kali berisi disinformasi. Dalam perang asimetris, algoritma ini dimanfaatkan oleh aktor negara dan non-negara untuk menyebarkan narasi yang mendiskreditkan lawan mereka. Akibatnya, masyarakat sering kali terjebak dalam "echo chambers" yang memperkuat pandangan yang bias. Disinformasi memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi publik. Sebuah studi oleh Newman et al. (2023) menunjukkan bahwa masyarakat yang terpapar disinformasi secara terus-menerus cenderung kehilangan

kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan media arus utama. Dalam konteks Indonesia, disinformasi yang berfokus pada isu-isu identitas dapat memperburuk polarisasi sosial dan mengurangi kohesi nasional.

Disinformasi sering digunakan sebagai senjata politik untuk melemahkan stabilitas pemerintahan. Contoh nyata adalah penggunaan informasi palsu untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemilu atau pejabat negara. Menurut laporan dari King et al. (2023), strategi ini sering kali dirancang untuk memanfaatkan momen-momen kritis, seperti pemilu atau krisis nasional, guna memaksimalkan dampaknya terhadap stabilitas politik. Disinformasi dapat memicu polarisasi sosial yang tajam. Studi oleh Guess et al. (2023) menunjukkan bahwa disinformasi yang berfokus pada isu-isu sensitif, seperti agama atau etnis, memiliki potensi besar untuk menciptakan konflik horizontal. Dalam perang asimetris, polarisasi ini sering dimanfaatkan untuk memperlemah solidaritas nasional, sehingga memudahkan intervensi eksternal. Respon publik terhadap disinformasi sangat beragam, tergantung pada tingkat literasi media dan kepercayaan terhadap sumber informasi. Penelitian oleh Fletcher et al. (2023) menunjukkan bahwa masyarakat dengan literasi media yang rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh disinformasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi media menjadi langkah penting dalam strategi pertahanan terhadap disinformasi. Untuk menghadapi ancaman disinformasi dalam perang asimetris, diperlukan pendekatan yang holistik. Menurut laporan oleh Johnson et al. (2023), strategi yang efektif meliputi edukasi literasi digital, penguatan regulasi media sosial, dan peningkatan transparansi pemerintah. Di Indonesia, implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat.

### **Strategi Menghadapi Disinformasi**

Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah pertama untuk menangkal disinformasi. Literasi digital memungkinkan masyarakat mengenali tanda-tanda disinformasi, seperti sumber yang tidak kredibel dan judul yang sensasional. Menurut penelitian oleh Livingstone dan Helsper (2023), masyarakat dengan literasi digital yang baik lebih mampu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kampanye literasi digital di Indonesia dapat difokuskan pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap hoaks, seperti warga lanjut usia dan pengguna media sosial baru. Kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital sangat penting untuk menyaring informasi yang beredar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan media arus utama untuk menyediakan informasi yang kredibel, sementara platform digital seperti Facebook dan Twitter dapat mengimplementasikan mekanisme fact-checking. Studi oleh Gillespie et al. (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat mengurangi penyebaran disinformasi hingga 30% dengan pendekatan berbasis algoritma dan moderasi manusia. Kecerdasan buatan (AI) memainkan peran penting dalam mendeteksi dan menganalisis pola disinformasi. AI dapat digunakan untuk memantau aktivitas media sosial secara real-time dan mengidentifikasi konten yang memiliki potensi menjadi disinformasi. Sebagai contoh, penelitian oleh Ferrara et al. (2023) menunjukkan bahwa algoritma AI mampu mengidentifikasi jaringan bot dengan akurasi hingga 85%, sehingga memudahkan penghapusan konten palsu sebelum menyebar luas. Regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar disinformasi perlu diperkuat. Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi model regulasi dari negara-negara lain, seperti Jerman dengan NetzDG (Network Enforcement Act), yang memberikan denda berat kepada platform digital yang gagal menghapus konten ilegal. Penelitian oleh Keller dan Neuberger (2023) mencatat bahwa regulasi yang ketat dapat mengurangi jumlah konten disinformasi di platform digital hingga 40% dalam dua tahun pertama implementasi.

Program penyuluhan berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman disinformasi. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajarkan cara mengidentifikasi dan melaporkan disinformasi. Menurut laporan UNESCO (2023), penyuluhan berbasis komunitas terbukti meningkatkan kemampuan deteksi disinformasi hingga 25% pada kelompok sasaran, terutama di daerah pedesaan. Mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum formal di sekolah-sekolah adalah langkah jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tangguh terhadap disinformasi. Sebuah studi oleh Hobbs dan Coiro (2023) menyebutkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan literasi digital memiliki pemahaman lebih baik tentang manipulasi informasi. Di Indonesia, kurikulum ini dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi open-source seperti perangkat lunak deteksi hoaks dapat digunakan secara luas oleh masyarakat dan media. Teknologi ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar untuk mendeteksi disinformasi secara mandiri. Penelitian oleh Burel et al. (2023) menggarisbawahi bahwa penggunaan teknologi open-source meningkatkan kecepatan identifikasi disinformasi hingga 50% dibandingkan metode manual. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki peran strategis dalam memerangi disinformasi melalui kampanye sosial dan advokasi kebijakan. OMS dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang benar. Menurut studi oleh Carvin dan Hunt (2023), OMS yang terorganisasi dengan baik mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi hingga 20%, yang merupakan langkah penting dalam menangkal dampak disinformasi.

#### **Studi Kasus Pemilu 2024**

Studi kasus Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan disinformasi politik yang signifikan, dengan temuan 1.292 disinformasi sepanjang 2023, meningkat dua kali lipat dari 2019. Platform utama penyebaran hoaks adalah YouTube (44,6%), Facebook (34,4%), dan TikTok (9,3%). Disinformasi ini sering kali menyerang capres-cawapres dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Misalnya, unggahan di Twitter mengklaim bahwa KPU membatalkan daftar partai peserta Pemilu 2024, yang faktanya adalah undangan untuk rapat pleno (Muzaki, 2024). Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu menemukan isu yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan kredibilitas tahapan pemilu menjadi semakin menonjol. Klaim keberpihakan lembaga penyelenggara dan isu kecurangan pemilu meskipun persentasenya tidak tinggi, sangat berdampak pada kepercayaan publik. Selain itu, ujaran kebencian meningkat, terutama menyasar kelompok rentan seperti perempuan, LGBTIQ, dan etnis minoritas (Muzaki, 2024). Pemerintah, melalui Bawaslu dan Kominfo, telah mengambil langkah untuk men-takedown konten bermuatan hoaks dan ujaran kebencian. Langkah strategis melibatkan deteksi keamanan siber oleh BSSN dan kerja sama dengan platform media sosial. Presiden Joko Widodo disebut memiliki peran signifikan dalam mengurangi eskalasi disinformasi, menciptakan stabilitas politik yang lebih baik (Komdigi, 2022). Strategi menghadapi disinformasi memerlukan kolaborasi lintas sektor, literasi digital, dan regulasi yang ketat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Disinformasi sebagai bentuk ancaman asimetris menunjukkan pentingnya respons kolektif yang proaktif untuk melindungi integritas pemilu dan menghindari konflik sosial (Komdigi, 2022).

#### **KESIMPULAN**

Strategi yang efektif dalam menghadapi disinformasi dalam perang asimetris harus berfokus pada pendekatan multidimensi yang mencakup penguatan literasi digital, kolaborasi lintas sektor, regulasi yang tegas, dan pemanfaatan teknologi. Literasi digital menjadi pilar utama dalam membekali masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang mereka

konsumsi, sekaligus mampu mengenali dan menangkali disinformasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital menjadi kunci untuk memastikan penyaringan informasi yang lebih efektif. Peran teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) sangat penting dalam mendeteksi pola penyebaran disinformasi secara real-time, sehingga tindakan preventif dapat diambil lebih awal. Pemerintah juga perlu memperkuat kerangka hukum dan penegakan regulasi untuk mengatasi ancaman disinformasi. Pengadopsian model seperti NetzDG dari Jerman dapat menjadi acuan untuk meningkatkan tanggung jawab platform digital dalam menghapus konten berbahaya. Di sisi lain, membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah menjadi prioritas untuk menangkali narasi manipulatif yang sering dimanfaatkan oleh pelaku perang asimetris. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Indonesia dapat mengurangi dampak destruktif dari disinformasi terhadap stabilitas sosial dan politiknya. Langkah mitigasi yang berbasis pada ketahanan nasional dan komunikasi strategis harus dimulai dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program edukasi literasi digital yang sistematis. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap ancaman informasi palsu. Komunikasi strategis pemerintah yang transparan dan konsisten juga diperlukan untuk melawan narasi negatif yang beredar di masyarakat. Selain itu, penguatan regulasi terkait penyebaran informasi, seperti revisi UU ITE, harus diarahkan untuk menangani penyebaran disinformasi secara lebih efektif. Teknologi deteksi berbasis AI dapat dimanfaatkan untuk memonitor media sosial dan platform digital lainnya, sehingga distribusi disinformasi dapat diminimalisir. Dalam konteks masyarakat Indonesia, penyuluhan berbasis komunitas juga menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pesan anti-disinformasi secara langsung, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap hoaks. Langkah-langkah ini, jika dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, dapat menciptakan ketahanan nasional yang lebih baik dalam menghadapi ancaman disinformasi yang semakin kompleks.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, D. (2023). *Konflik Horizontal dan Dampaknya terhadap Keamanan Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Buffalo, J. (2019). *Understanding Asymmetric Warfare: A Guide to Modern Conflicts*. Cambridge University Press.
- Burel, G., Alani, H., & Fernandez, M. (2023). "Open-Source Solutions for Combating Fake News." *Journal of Open Technologies*.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Carvin, A., & Hunt, E. (2023). "Role of Civil Society in Countering Disinformation." *Public Advocacy Review*.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ferrara, E., Cresci, S., & Lillo, F. (2023). "Detecting Bots and Misinformation Networks." *Artificial Intelligence Journal*.
- Fletcher, R., Cornia, A., & Nielsen, R. K. (2020). Measuring the reach of "fake news" and online disinformation in Europe. *European Journal of Communication*, 35(3), 213–223.
- Fletcher, R., Cornia, A., & Nielsen, R. K. (2023). "Measuring the Impact of Media Literacy on Misinformation." *Journal of Media Literacy Education*.
- Gillespie, T., Boczkowski, P. J., & Foot, K. A. (2023). "Cross-Sector Collaboration to Combat Disinformation." *Digital Communication Review*.
- Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). Exposure to untrustworthy websites in the 2016 US election. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 472–480.

- Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2023). "Polarization and the Spread of Misinformation." *Political Communication Journal*.
- Hastuti, A. (2023). *Strategi Informasi dalam Menghadapi Ancaman Disinformasi*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
- Hidayat, B. (2022). *Teknologi dan Disinformasi: Tantangan di Era Digital*. Bandung: ITB Press.
- Hobbs, R., & Coiro, J. (2023). "Integrating Digital Literacy in Education Systems." *Education and Information Technologies*.
- Johnson, T., Smith, K., & Brown, L. (2023). "Countering Disinformation in the Digital Age: Strategies and Challenges." *Global Policy Journal*.
- Jones, M. (2023). "Asymmetric Warfare and Information Operations." *Journal of Global Security*, 45(3), 223-240.
- Jones, P. (2021). *Digital Wars: The Role of Technology in Asymmetric Conflicts*. Oxford University Press.
- Keller, T., & Neuberger, C. (2023). "Regulating Disinformation in Digital Platforms: A Comparative Study." *Media Policy Quarterly*.
- King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. (2023). "How Disinformation Undermines Democracy." *American Political Science Review*.
- Komdigi. (2022). (DISINFORMASI) KPU Menganulir Keputusan Peserta Pemilu 2024. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/disinformasi-kpu-menganulir-keputusan-peserta-pemilu-2024>
- Kurniawan, R. (2023). "The Adaptability of Disinformation in Local Contexts." *Asian Journal of Political Science*, 19(4), 341-360.
- LIPI. (2022). "Kemampuan Literasi Digital Masyarakat Indonesia: Hasil Studi 2022." Jakarta: LIPI.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people, and the digital divide. *New Media & Society*, 9(4), 671-696.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2023). "Digital Literacy in a Post-Truth Era." *Journal of Media Studies*.
- Muzaki, Ajid Fuad. (2024). Gejolak Disinformasi Menjelang Pemilu 2024. <https://rumahpemilu.org/gejolak-disinformasi-jelang-pemilu-2024/>
- Newman, N., Fletcher, R., & Kalogeropoulos, A. (2023). "Reuters Institute Digital News Report." Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Prasetyo, Y. (2023). *Perang Asimetris dan Tantangan Keamanan Modern*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Putri, S., & Anggraeni, R. (2023). "Evaluasi UU ITE dalam Menghadapi Disinformasi." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 101-115.
- Rachman, T. (2023). *Membangun Kesadaran Informasi di Era Digital*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Santoso, M. (2023). "The Role of Social Media Platforms in Combating Disinformation." *Digital Policy Review*, 12(1), 45-63.
- Simanjuntak, L. (2023). "Public Trust and the Challenges of Governance in Indonesia." *Indonesian Journal of Public Administration*, 20(3), 202-218.
- Siregar, E. (2022). Implementasi UU ITE dalam penanganan disinformasi di era digital. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 12(3), 15-25.
- Siregar, F. (2022). "Media Sosial dan Penyebaran Informasi Palsu di Indonesia." *Komunikasi dan Masyarakat*, 18(4), 123-138.
- Smith, R. (2020). *Propaganda and Disinformation in Modern Warfare*. Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2023). "Algorithmic Amplification and Misinformation in the Digital Age." *Digital Journalism*.
- UNESCO. (2023). "Community-Based Approaches to Media Literacy." UNESCO Policy Report.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2023). "The Spread of True and False News Online." *Science Journal*.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe Report.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe Report.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2022). "Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework." Council of Europe Report.
- Wibowo, P. (2023). *Big Data Analytics dalam Deteksi Disinformasi*. Jakarta: BINUS Press.
- Yusuf, H., & Rahmat, A. (2023). "Cultural Diversity and the Threat of Disinformation in Indonesia." *Asian Cultural Studies Journal*, 25(2), 98-110.